



# RENJA 2025

## DINAS PERHUBUNGAN



**Jl. Aloon-Aloon Utara No.9**  
**Telp/Fax . (0352) 485015**  
**KABUPATEN PONOROGO**



## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan arah dan sebagai pedoman bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pembangunan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau pada masyarakat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna, namun harapan kami Rencana Kinerja Tahunan ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program dibidang Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 13 Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PONOROGO



**WAHYUDI, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 690815 199603 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN</b>	
<b>    LALU.....</b>	<b>4</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	17
2.5 Penelaah usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>27</b>
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	27
3.3 Program dan Kegiatan .....	28
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	
<b>    PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>41</b>

LAMPIRAN :

- a. Bagan Organisasi
- b. Matrik Renstra
- c. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
- d. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya sasaran dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2025 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dan di analisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Data Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV : PENUTUP**

Lampiran

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Perhubungan Tahun 2021 - 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Capaian kinerja pembangunan bidang Perhubungan dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menangani dua urusan yang menjadi tugas pokok yaitu urusan perhubungan.

Jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi :

- a. jaringan pelayanan angkutan jalan,
- b. jaringan prasarana angkutan jalan,
- c. fasilitas perlengkapan jalan,
- d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- e. penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal barang
- f. pengujian kendaraan bermotor,
- g. keselamatan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang Perhubungan.

Bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam memcapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SKPD selama Tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 terdiri dari atas sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)	
1	3	4	5	6	7	
1	<b>Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang mendukung pengembangan Kabupaten Ponorogo</b>	1	Persentase konektivitas antar wilayah	41,44%	72,21%	174%
		2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	70%	56%	80%
		3	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	2,70%	2,72%	100,7%

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dalam upaya mencapai visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Pagu Total DPPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 22.843.585.499,00

Secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.590.603.223,00 atau sebesar 99,46% dari pagu total.

Rincian hasil evaluasi renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

**Format A : Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Ponorogo**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>														
	<b>Bidang Perhubungan</b>														
2.	15.	02	2	02		<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Persentase lalu lintas dan angkutan jalan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>			
2.	15.	02	2	02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>90%</b>	<b>54%</b>	<b>70 %</b>	<b>56%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>190%</b>	<b>211%</b>
2.	15.	02.	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (unit)	200	543	262	556	213%	262	1361	7%
2.	15.	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (unit)	2500	2435	2400	2395	99%	2400	7230	2,89%

2.	15.	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>15.</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>90%</b>	<b>54%</b>	<b>70%</b>	<b>56%</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>180%</b>	<b>2%</b>	
2.	15.	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	1	1	1	100%	12	14		1,16%
<b>2.</b>	<b>15.</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas</b>	<b>2,80%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,70%</b>	<b>2,72%</b>	<b>100,4%</b>	<b>2,70%</b>	<b>8,45%</b>	<b>3,01%</b>	
2.	15.	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (unit)	11	9	9	9	100%	9	27		2,45%

2.	15.	02	2	06				2,80%	3,03%	2,70%	2,72%	100,4%	2,70%	8,45%	3,01%
						<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas</b>								
2.	15.	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (laporan)	1	1	2	2	100%	1	4	4%
2.	15.	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (dokumen)	45	35	34	30	90%	45	45	1%
2.	15.	02	2	06	03	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	2	2	2	100%	2	5	5%
2.	15.	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	12	2	2	2	100%	12	16	1,33%



2.	15.	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	8	8	8	8	100%	8	24	3%
2.	15.	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun (dokumen)	5	5	5	5	100%	5	15	3%
<b>2.</b>	<b>15.</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>
2.	15.	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	75	75	75	75	100%	76	226	3%
2.	15.	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (paket)	12		26	26	100%	12	36	3%
							Jumlah penerima administrasi pelaksanaan tugas ASN dan honor teknis (orang)		18						
<b>2.</b>	<b>15.</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>
2.	15.	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	110	120	120	120	100%	120	120	1%

							Jumlah pakaian dinas yang dibeli (orang)		120	0	0	0	0	0	0	0%
2.	15.	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	5	200	93	93	100%	5	298	59,6%	
2.	15.	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>	
2.	15.	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	1	1	100%	1	3	3%	
2.	15.	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	11	11	11	100%	9	31	31%	
							Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (buah)		11							
2.	15.	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	7	1	1	1	100%	7	9	1,3%	
2.	15.	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1	15	15	100%	1	31	31%	

2.	15.	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	48	48	48	48	100%	48	108	2,25%
2.	15.	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	100	81	60	81	120%	90	252	2,52%
<b>2.</b>	<b>15.</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>
2.	15.	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	5		5	5	100%	5	15	3%
							Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola (surat)		1400						
2.	15.	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	36	36	36	100%	36	108	3
2.	15.	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	15	50	50	50	100%	15	115	7,6%

2.	15.	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>
2.	15.	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny (unit)	2	2	2	2	100%	2	6	3%
2.	15.	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11	10	10	10	100%	11	31	3%

2.	15.	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	3	3	3	100%	1	7	7%
----	-----	----	---	----	----	--	---	---	---	---	---	------	---	---	----


 Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Ponorogo  
**Wahyudi, S.H.,M.M**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690815 199603 1 004

Dalam evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD pada Tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 terdapat 2 program dan 11 kegiatan dengan anggaran belanja Rp19.094.651.846,00 Dengan target capaian fisik dan keuangan 100%.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 memuat program dan kegiatan utama yang berkaitan langsung dalam upaya pencapaian strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang mendukung pengembangan Kabupaten Ponorogo.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menentukan proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah dengan perbandingan antara target pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dengan realisasinya dalam waktu tertentu. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Format B : Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase konektivitas antar wilayah	-	-	37,44%	39,44%	41,44%	43,44%	65,79%	72,21%	43,44%	53,44%	Terpenuhi
2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	-	-	50%	60%	70%	80%	54%	56%	80%	80%	Tidak Terpenuhi
3	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	-	-	2,60%	2,65%	2,70%	2,75%	3,03%	2,72%	2,75%	2,80%	Terpenuhi

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis capaian indikator kinerja setiap tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase konektivitas antar wilayah
- 2) Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
- 3) Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada dasarnya program dan kegiatan yang dipilih dan ditetapkan dalam Renja 2025 telah sesuai dengan Renstra-SKPD, namun demikian terdapat hal-hal yang menjadi perhatian sekaligus prioritas pembangunan yang kami tuangkan dalam Renja 2025. Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan

Beberapa isu-isu penting di bidang Perhubungan adalah berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor dengan adanya pengadaan alat – alat baru uji di Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 2) Pembangunan gedung Pengujian kendaraan bermotor karena gedung yang sekarang milik provinsi;
- 3) Fasilitas perlengkapan jalan (marka, rambu, RPPJ, APILL, guardrail, delineator, cermin tikungan, dan paku jalan) yang belum memadai dan sebagian besar umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan /penggantian;
- 4) Peningkatan fasilitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Prasarana Lalu Lintas dengan adanya kendaraan mobil sky light;
- 5) Pengawasan dan penertiban parkir di tepi jalan umum;
- 6) Menciptakan kelancaran lalu lintas dengan peningkatan pelaksanaan pengawasan dan penertiban angkutan oleh petugas DALOPS;
- 7) Mendukung kegiatan Aksi Pembangunan Rendah Karbon yang menjadi isu prioritas Nasional seperti adanya Car Free Day, Pemeliharaan dan Pengadaan PJU IED, balik grtais.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun oleh BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam

Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

**Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Ponorogo  
Dinas Perhubungan**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	perhubungan	Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	7.860.157.918	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	perhubungan	Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	8.158.893.908	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perhubungan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	13 dokumen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perhubungan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	13 dokumen	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	10.000.000	

	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	10.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>7.198.893.908</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>7.198.893.908</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang	6.857.927.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 orang	6.857.927.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	perhubungan	jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang	340.966.908	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	perhubungan	jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang	340.966.908	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	

		n									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	perhubungan	jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	perhubungan	jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 paket	20.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	20.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>1 paket</b>	<b>307.919.010</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>460.000.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	10.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	143.919.010	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	250.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	8.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	140.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>163.585.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	39.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	114.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 laporan	10.235.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 laporan	30.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase sarana dan prasana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>169.760.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase sarana dan prasana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	73.467.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	46.292.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	60.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	100.000.000	

			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</b>		<b>16.352.203.328</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</b>		<b>29.399.089.000</b>	
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>90%</b>	<b>10.634.528.445</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>80%</b>	<b>12.000.000.000</b>	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2500 unit	8.534.528.445	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2500 unit	10.000.000.000	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	200 unit	2.100.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	200 unit	2.000.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	perhubungan	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan	0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	perhubungan	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan	0	0	
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>90%</b>	<b>2.130.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>80%</b>	<b>2.150.000.000</b>	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	2.130.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	2.150.000.000	
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas</b>	<b>2,8%</b>	<b>661.575.000</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas</b>	<b>2,75%</b>	<b>1.000.000.000</b>	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 unit	661.575.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 unit	1.000.000.000	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas</b>	<b>2,8%</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas</b>	<b>2,75%</b>	<b>1.205.000.000</b>	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 laporan	65.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	65.000.000	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	45 dokumen	850.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	perhubungan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	45 unit	900.000.000	

								Rekayasa Lalu Lintas			
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	60.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	175.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	180.000.000	
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Presentase konektivitas antar wilayah</b>	<b>53,44%</b>	<b>1.786.099.883</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>perhubungan</b>	<b>Presentase konektivitas antar wilayah</b>	<b>43,44%</b>	<b>1.789.099.883</b>	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 unit	1.469.099.883	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 unit	1.469.099.883	

	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	317.000.000	Penye Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	320.000.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Perangkat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam kegiatan pembangunan bidang transportasi diperlukan juga memperhatikan aspirasi masyarakat, menggali dan memanfaatkan potensi yang ada yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Perangkat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

**Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2025 Kabupaten Ponorogo**

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume /anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>		<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>90%</b>	
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>90%</b>	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kecamatan Mlarak	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan umum	170.000.000	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / kota</b>		<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>		
	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	Jalan Lingkar Ngebel	Pengadaan Guardrail Lingkar Telaga	650.000.000	

*Sumber: hasil musrenbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2024*

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala. Untuk mendukung tujuan tersebut maka berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Data Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dan dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan ;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

**Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)** merupakan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan untuk menjalankan Visi tersebut Dinas Perhubungan menjalankan Misi nomor 3 (Tiga) sesuai dengan Misi Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

**“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**

Adapun untuk mewujudkan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan pembangunan dan kinerja Perhubungan di Kabupaten Ponorogo

b. Sasaran :

Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang mendukung pengembangan Kabupaten Ponorogo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan pembangunan dan kinerja Perhubungan di Kabupaten Ponorogo.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perhubungan(%)	85	88	88	88	88
		Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang mendukung pengembangan	Persentase konektivitas antar wilayah (%)	39,44	41,44	43,44	53,44	55,44
			Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan (%)	60	70	80	90	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Kabupaten Ponorogo	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas (%)	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, Berikut Program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2025 sebagai berikut :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** dengan kegiatan:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
  1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
  2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
  3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
  5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**Format E : Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan**  
**Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Ponorogo**  
**Dinas Perhubungan**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 9 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	perhubungan	100%	7.860.157.918	APBD II		100%	8.158.893.908
2 9 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	perhubungan	13 dokumen	10.000.000	APBD II		13 dokumen	20.000.000
2 9 1 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perhubungan	5 dokumen	5.000.000	APBD II		5 dokumen	10.000.000
2 9 1 1 1 06	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	perhubungan	8 dokumen	5.000.000	APBD II		8 dokumen	10.000.000



2	9	1	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	perhubungan	10 orang	10.000.000	APBD II		10 orang	20.000.000
2	9	1	1	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>perhubungan</b>	<b>100%</b>	<b>307.919.010</b>	<b>APBD II</b>		<b>1 paket</b>	<b>460.000.000</b>
2	9	1	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Perhubungan	1 paket	1.500.000	APBD II		1 paket	2.000.000
2	9	1	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	perhubungan	1 paket	5.000.000	APBD II		1 paket	10.000.000
2	9	1	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	perhubungan	7 paket	143.919.010	APBD II		7 paket	250.000.000
2	9	1	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Perhubungan	1 paket	50.000.000	APBD II		1 paket	50.000.000
2	9	1	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Perhubungan	48 dokumen	7.500.000	APBD II		48 dokumen	8.000.000

2	9	1	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perhubungan	100 laporan	100.000.000	APBD II		100 laporan	140.000.000
2	9	1	1	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>100%</b>	<b>163.585.000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>
2	9	1	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	perhubungan	5 laporan	39.000.000	APBD II		5 laporan	40.000.000
2	9	1	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	perhubungan	36 laporan	114.350.000	APBD II		36 laporan	130.000.000
2	9	1	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	perhubungan	15 laporan	10.235.000	APBD II		15 laporan	30.000.000
2	9	1	1	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>perhubungan</b>	<b>100%</b>	<b>169.760.000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>
2	9	1	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	perhubungan	2 unit	73.467.800	APBD II		2 unit	80.000.000
2	9	1	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	perhubungan	11 unit	46.292.200	APBD II		11 unit	60.000.000

2	9	1	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	perhubungan	1 unit	50.000.000	APBD II	1 unit	100.000.000
						<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</b>	<b>perhubungan</b>		<b>26.352.203.328</b>	<b>APBD II</b>		<b>27.109.089.000</b>
2	9	1	1	16		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>perhubungan</b>	<b>90%</b>	<b>10.634.528.445</b>	<b>APBD II</b>	<b>90%</b>	<b>12.000.000.000</b>
2	9	1	1	16	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	perhubungan	2500 unit	8.534.528.445	APBD II	2500 unit	10.700.000.000
2	9	1	1	16		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	perhubungan	200 unit	2.100.000.000	APBD II	200 unit	2.100.000.000
2	9	1	1	16	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan	perhubungan	0	0	APBD II	0	0
<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	<b>perhubungan</b>	<b>90%</b>	<b>2.130.000.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>90%</b>	<b>2.150.000.000</b>
2	9	1	1	18	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas	perhubungan	12 laporan	2.130.000.000	APBD II	12 laporan	2.150.000.000





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2026.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam institusi dengan mendasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ponorogo, 13 Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PONOROGO



**WAHYUDI, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690815 199603 1 004